

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan BKN sejak tahun 2010 merupakan upaya yang dilakukan BKN dalam rangka mewujudkan BKN sebagai instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani dengan baik. Dengan mengacu pada Road Map BKN yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2016 dimana dalam mencapai Visi BKN Tahun 2015-2019 "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025" dengan dijabarkan dalam lima misi BKN, maka diperlukan adanya strategi dan upaya yang sistematis untuk mewujudkannya. Upaya yang dilakukan guna mencapai visi dan misi BKN tersebut adalah dengan melakukan reformasi birokrasi lembaga melalui delapan area perubahan dengan target program dan kegiatan serta penetapan tahun pelaksanaan yang telah dituangkan dalam Road Map RB BKN. Secara khusus program kerja yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2015 – 2019 untuk area Manajemen Perubahan adalah melalui program Pemantapan Implementasi RB di BKN untuk tahun 2018 melalui Implementasi Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi BKN dan Pemantauan serta Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi BKN.

Dalam upaya mewujudkan BKN menjadi instansi yang Kredibel, Kompeten maka Kelompok Kerja Manajemen Perubahan berupaya untuk ikut andil dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang menjadi tantangan BKN. Tiga masalah besar yang tertuang dalam Road Map RB BKN menjadi prioritas untuk diselesaikan dimana ketiga hal itu adalah Komitmen semua pihak dalam mewujudkan RB BKN, Ego Sektroral yang masih dirasakan serta Budaya Kerja dalam pelayanan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Pokja Manajemen Perubahan dalam upaya mengelola perubahan secara makro atas tiga hal diatas, juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan RB BKN yang dilakukan oleh seluruh Pokja yang ada. Hal ini guna memastikan bahwa rencana aksi yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan BKN antara lain telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam suatu laporan yang rinci, lengkap, dan komprehensif, sehingga dapat dipahami secara cepat dan mudah oleh pihak-pihak di luar BKN termasuk dalam rangka penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB.

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 66/KEP/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara, disebutkan bahwa Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain untuk memberikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN sesuai area perubahannya masing-masing kepada Tim Pengarah RB BKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional.

3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menyediakan informasi yang rinci, lengkap dan komprehensif mengenai capaian-capaian yang telah diraih BKN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya Pokja Manajemen Perubahan selama tahun 2018, serta laporan semester pertama perkembangan RB BKN untuk tahun 2019. Laporan ini disusun dalam rangka penilaian pelaksanaan RB BKN oleh Kementerian PAN RB yang dilakukan secara berkala.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kemajuan Pelaksanaan RB BKN 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pertama memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan, tujuan penyusunan laporan, dan sistematika penulisan laporan.
2. Bagian Kedua memuat beberapa tanggapan BKN atas empat rekomendasi yang diberikan Kemen PAN RB ketika melakukan penilaian pelaksanaan RB tahun sebelumnya. Dan pelaksanaan program-program pada bidang Pokja Manajemen Perubahan yang memuat pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang Pengelolaan Perubahan, Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, review RENSTRA, Pembentukan Agen Perubahan, pengukuran capaian kinerja triwulanan, dan pemantauan rencana aksi dan tindak lanjut seluruh Pokja untuk awal tahun 2019.
3. Bagian Ketiga daftar lampiran memuat nama dokumen data dukung pelaksanaan

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KELOMPOK KERJA BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pelaksanaan Review Road Map Reformasi Birokrasi BKN

BKN telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi BKN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan pada 15 Juli 2016. Sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar BKN melakukan Review atas Road Map Reformasi Birokrasi, maka pada Bulan Mei 2019 telah dilakukan Review atas Road Map RB BKN yang meliputi dua hal, Review Quick Wins Reformasi Birokrasi BKN dan Review Terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BKN.

Badan Kepegawaian Negara telah mempersiapkan Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung Program-program Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Eksternal

Program *Quick wins* Eksternal pada periode 2015-2019 tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya, namun lebih fokus lagi pada peningkatan pelayanan publik dan penguatan pengawasan yaitu mengoptimalkan perbaikan penyelenggaran manajemen kepegawaian dengan melakukan pendekatan pelayanan publik dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan, dengan harapan bahwa publik dapat langsung merasakan manfaat dari program yang dijalankan serta berdampak positif bagi organisasi yaitu Citra Bersih dan Profesional. Adapun program *Quick Wins* yang telah ditetapkan untuk diterapkan antara lain:

- 1) Layanan Kepegawaian Terpadu,
- 2) Pembangunan *early warning system* (EWS),
- 3) Penerapan e-LAPOR,
- 4) Penyempurnaan *Integrated IT Based System* (rekonsiliasi data SAPK dan SIMPEG).

b. Internal

Program *Quick Wins* Internal di lingkungan BKN masih memiliki fokus pada tujuan membangun organisasi BKN yang modern dan peningkatan kompetensi ASN yang agresif di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Program tersebut meliputi:

- 1) Penerapan aplikasi e-kinerja Versi 3.0,
- 2) Pengembangan *e-office* (SIAVA, Si - ONI),
- 3) Penerapan *Whistle-Blowing System* (WBS),
- 4) Penetapan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Penetapan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

2. Hasil Reviu Terhadap Quick Wins

Penetapan quick wins dipandang memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN, tetapi juga menjadi unsur pendorong bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Kepala BKN No. 16 Tahun 2016 Quick Wins BKN difokuskan pada membina dan melaksanakan manajemen kepegawaian yang melingkupi:

a. e-PUPNS

Dalam rangka memperbarui data kepegawaian, BKN menjalankan kegiatan e-PUPNS (elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil), untuk mendata profil PNS di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya e-PUPNS ini diharapkan akan mewujudkan data kepegawaian yang akurat, mutakhir dan akuntabel.

b. e-Kinerja

Sejak diberlakukannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai alat untuk menilai kinerja pegawai, maka setiap instansi pemerintah wajib menerapkan kebijakan tersebut kepada masing-masing pegawainya. Untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan penilaian kinerja terhadap individu maupun unit kerja, maka akan digunakan e-Kinerja. e-Kinerja bukan hanya akan membantu setiap pegawai dalam melakukan pekerjaan yang akan dinilai, akan tetapi juga membantu pimpinan unit kerja dalam melaksanakan penilaian kinerja terhadap pegawai atau bawahannya.

c. Assesment Center Online

Sebagai upaya mewujudkan sistem meritokrasi, baik dalam penerimaan CPNS maupun pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan, maka digunakan metode penilaian yang sistematis dan terstruktur. Dalam hal ini, metode penilaian kompetensi PNS dilakukan melalui Assesment Center. Untuk mempercepat proses pelaksanaan Assesment Center dalam penilaian kompetensi PNS di Indonesia diarahkan berbasis teknologi informasi. Disamping cepat pendekatan ini juga akan mengakomodir jumlah peserta yang banyak dalam satu kesempatan secara online.

d. Early Warning System (EWS)

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, maka BKN berupaya menerapkan Early Warning System

(EWS) dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (SIMWASDALPEG) dan Whistleblowing System.

Tujuan penerapan SIMWASDALPEG adalah membangun suatu program aplikasi komputer berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola administrasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Dalam hal ini, dengan tersedianya informasi yang akurat, tepat dan cepat, maka pengelolaan data dan output informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen di BKN.

Selain itu, BKN juga menerapkan Whistleblowing System yaitu suatu sistem pengaduan masyarakat untuk memberikan ruang bagi para pengadu masalah kepegawaian yang menghendaki identitasnya dirahasiakan. Sistem ini didukung oleh aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh publik.

e. Talent Pool (Pemetaan JPT)

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya sangat ditentukan oleh para pejabat yang menduduki posisi-posisi strategis. Di lingkungan instansi pemerintah, jabatan strategis adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Instansi harus menyiapkan kader-kader yang akan menduduki JPT. Kader-kader potensial ini dimasukkan dalam kelompok Talent Pool. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, BKN berinisiatif membangun Talent Pool JPT nasional, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh instansi. Talent Pool JPT dilakukan melalui penilaian kompetensi dan potensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator tahun 2015-2019.

f. e-Office (Mail Tracking, e-Traveling, dan e-Monev)

Untuk memudahkan dan memperlancar kerjasama dan koordinasi antar unit kerja dalam pelayanan internal dan pelayanan kepegawaian di lingkungan BKN, maka diterapkan e-Office berupa Mail Tracking (Dispositioni Surat), e-Traveling, dan e-Monev. e-Office juga diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kepegawaian dan pelayanan internal BKN.

3. Hasil Reviu Terhadap Rencana Aksi

Perlu dilakukannya proses secara bertahap terkait pelaksanaan kegiatan dalam setiap area perubahan dalam setiap tahunan dan menetapkan kegiatan setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk mengoperasionalkan program-program yang tercantum dalam Quick Wins BKN, maka Tim Reformasi Birokrasi BKN membentuk kelompok kerja-kelompok kerja (Pokja). Setiap Pokja bertanggung jawab untuk mensukseskan program-program yang mendukung reformasi birokrasi di BKN. Adapun Rencana Aksi dari masing-masing pokja dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Kelompok Kerja	Rencana Aksi
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi Keputusan Kepala BKN tentang Tim Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2019. 2. Menyusun Rencana Aksi dan Tindak Lanjut RB BKN 2019. 3. Melakukan Reviu Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2015-2019. 4. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI) kepada seluruh pegawai BKN, baik Pusat maupun Kantor Regional. 5. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Tim Assessor tentang pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI). 6. Optimalisasi peran Agen Perubahan (merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program RB). 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala.
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Harmonisasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Review dan Pemetaan Kelompok Peraturan Perundang-undangan. ▪ Perluasan Stakeholder (Unit kerja dan Instansi terkait) dalam Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 2. Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan

		<p>Peraturan undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan SOP dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan Instrumen Hukum lainnya. ▪ Penyiapan format Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan Instrumen Hukum lainnya. ▪ Penyusunan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. ▪ Optimasi fungsi Monitoring dan Evaluasi dalam rangka menyerap aspirasi kebutuhan dan evaluasi terhadap regulasi kepegawaian. ▪ Pembangunan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan konsep Keputusan Kepala Badan tentang pengaturan pertanggungjawaban Kepala UPT. 2. Menyesuaikan PK dengan Renstra BKN 2020-2024. 3. Memberikan rekomendasi kepada Pokja Akuntabilitas untuk memasukkan area cascade dari PK setingkat Kepala, JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ke dalam sistem e-kinerja. 4. Menyusun rancangan struktur organisasi sesuai dengan kinerja (sasaran

		<p>strategis).</p> <p>5. Membuat dan menindaklanjuti hasil Analisis kesuaian antara strategi organisasi dengan struktur, analisis kesesuaian struktur dengan kinerja (IKU) dengan mengukur validitas IKU.</p> <p>6. Melaksanakan koordinasi antara Roren, Unit Kerja, dan Pokja dalam menetapkan PK.</p>
4	Penataan Tatalaksana	<p>1. Membuat Proses Bisnis.</p> <p>2. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginventarisir dan melakukan Monitoring dan Evaluasi SOP di Semua Unit Kerja. ▪ Memetakan dan Fokus Pada Evaluasi SOP Strategis Yang Terkait Langsung dengan Pelayanan Kepegawaian Sebagai Bahan Evaluasi Oleh Tim Kemenpan, Diantaranya: Kedeputian Mutasi, Kedeputian WASDAL, PPSR dan PUSPENKOM. ▪ Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional. <p>3. Melakukan Pengembangan E-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginventarisir aplikasi yang digunakan oleh Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. ▪ Menginventarisir aplikasi berbagi pakai

		<p>baik tingkat Nasional maupun Internal BKN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Kegiatan SPBE Tahun 2019 dan Program Percepatan Integrasi Sistem Kepegawaian. <p>4. Menerapkan Kebijakan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memelihara Konten Informasi dan Dokumentasi yang berhak diketahui masyarakat. ▪ Memanfaatkan Sosial Media sebagai Media Informasi. <p>5. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun Draft Perubahan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Perubahan SOTK BKN. ▪ Melakukan Monitoring dan Evaluasi Informasi yang dikecualikan. <p>6. Kualitas Pengelolaan Karsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP tentang Penyelenggaraan Karsipan. ▪ Menyusun Draft Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Penyelenggaraan Karsipan.
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Pembangunan Sistem

		<p>Merit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. 3. Optimisasliasi Penerapan Peraturan Disiplin dan Kode atik Pegawai. 4. Pemutakhiran bobot dan kelas jabatan
6	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan renstra BKN 2015-2019 dab cascading indikator kinerja. 2. Asistensi dan penguatan pemanfaatan E-kinerja BKN. 3. Asistensi penyusunan Laporan Kinerja. 4. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di BKN. 5. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemeringkatan SAKIP di BKN.
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbarui SK UPG. 2. Membangun komitmen pimpinan bersama KPK terkait penanganan gratifikasi. 3. Sosialisasi dan BIMTEK tentang gratifikasi. 4. Membuat KEPKA BKN tentang SPIP di BKN. 5. Meningkatkan nilai maturitas SPIP BKN dengan melaksanakan beberapa program kegaitan, antara lain: Membentuk Satgas SPIP Tinkat K/L, Eselon I dan Kanreg; MEmbuat Pedoman Manajemen Resiko; Membuat Komite Resiko;

		<p>6. Sosialisasi Manajemen Resiko; Melakukan Identifikasi Resiko; Melakukan Penilaian Resiko; Melakukan Mitigasi Resiko; dan Menyusun Register Resiko.</p> <p>7. Mengintensifkan sosialisasi WBS.</p> <p>8. Laporan penerapan WBS secara berkala (tri wulan).</p> <p>9. Memperbarui SK Tim tentang Benturan Kepentingan.</p> <p>10. Mengoptimalkan kegiatan penilaian ZI terhadap unit kerja yang akan diusulkan sebagai "menuju WBK".</p> <p>11. Menetapkan 1 unit kerja sebagai WBK.</p>
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<p>1. Peningkatan kualitas implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan Supervisi Kinerja Pelayanan.</p> <p>3. Penguatan Integritas dalam Pelayanan Publik.</p>

Penjabaran dan penajaman rencana aksi Road Map RB BKN 2015-2019 yang sudah dibuat per tahun dengan sequence yang logis dan berkesinambungan diharapkan mampu menjadikan Road Map sebagai peta jalan reformasi birokrasi dan secara praktikal dapat dilaksanakan sehingga dapat mencapai mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan yang telah dibuat per tahun mulai 2018 sampai 2019.

No.	Program Mikro	2018	2019
1	Manajemen Perubahan	1. Implementasi Rencana Aksi Tindak Lanjut	1. Implementasi Rencana Aksi Tindak Lanjut

		<p>Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi BKN.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi BKN</p>	<p>(RATL) Reformasi Birokrasi BKN.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi BKN</p>
2	Penataan Peraturan Perundang- undangan	<p>Harmonisasi</p> <p>1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron</p> <p>2. Merevisi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron</p> <p>3. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang- undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan system pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/ Policy Paper, dan Paraf Koordinasi; b. Mengevaluasi pelaksanaan system 	<p>Harmonisasi</p> <p>1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron</p> <p>2. Merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron</p> <p>3. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan system pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/ Policy Paper, dan Paraf Koordinasi b. Mengevaluasi pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-

		pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan.	undangan
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>1. Analisis Kelembagaan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (Penyesuaian terhadap UU ASN dan Peraturan Pelaksanaannya)</p> <p>2. Analisis Kelembagaan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Penyesuaian terhadap UU ASN dan Peraturan Pelaksanaannya)</p> <p>3. Penguatan Unit PelaksanaTeknis Unit Penyelenggara Seleksi dan Penilaian Kompetensi PNS</p> <p>4. Evaluasi Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Negara</p> <p>5. Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan BKN</p> <p>6. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan BKN</p> <p>7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan BKN</p>	<p>1. Analisis Kelembagaan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (Penyesuaian terhadap UU ASN dan Peraturan Pelaksanaannya)</p> <p>2. Analisis Kelembagaan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Penyesuaian terhadap UU ASN dan Peraturan Pelaksanaannya)</p> <p>3. Penguatan Unit PelaksanaTeknis Unit Penyelenggara Seleksi dan Penilaian Kompetensi PNS</p> <p>4. Evaluasi Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Negara</p> <p>5. Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan BKN</p> <p>6. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan BKN</p> <p>7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan BKN</p>
4	Penataan Tatalaksana	1. Monitoring Implementasi SOP di semua satuan	1. Monitoring Implementasi SOP di semua satuan kerja

	<p>kerja BKN</p> <p>2. Menindaklanjuti penyelesaian hambatan dan permasalahan implementasi SOP di Satuan Kerja BKN</p> <p>3. Melakukan pengembangan <i>e-government</i> dilingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: internet, Sistem perencanaan dan penganggaran, system database)</p> <p>4. Melakukan pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>5. Melakukan pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perizinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)</p> <p>6. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik</p> <p>7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p>	<p>BKN</p> <p>2. Menindaklanjuti penyelesaian hambatan dan permasalahan implementasi SOP di Satuan Kerja BKN</p> <p>3. Melakukan pengembangan <i>e-government</i> dilingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: internet, Sistem perencanaan dan penganggaran, system database)</p> <p>4. Melakukan pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p> <p>5. Melakukan pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perizinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)</p> <p>6. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi public</p> <p>7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p>
--	---	--

		keterbukaan informasi publik	
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>1. Pemetaan Kebutuhan Pegawai Berbasis Kualifikasi dan Kompetensi, serta Renstra BKN dengan menggunakan E-Perencanaan Pegawai</p> <p>2. Profiling Potensi Calon Pegawai dan Pemutakhiran materi tes</p> <p>3. Penelusuran pelamar potensial bekerjasama dengan perguruan tinggi</p> <p>4. <i>Talent Pool/</i> Manajemen Talenta (Pengawas, Administrator, dan JPT Pratama)</p> <p>5. <i>Profiling fitting</i> Potensi dan Kompetensi Pegawai dengan Jabatan</p> <p>6. Sertifikasi Teknis Pengelola Kepegawaian</p> <p>7. Penerapan magang kerja</p> <p>8. Pengembangan Karier Berbasis Merit dengan pemanfaatan E-Manajemen Talenta</p> <p>9. Penerapan Seleksi Terbuka</p> <p>10. Profiling Kinerja Pegawai</p> <p>11. Penerapan</p>	<p>1. Pemetaan Kebutuhan Pegawai Berbasis Kualifikasi dan Kompetensi, serta Renstra BKN dengan menggunakan E-Perencanaan Pegawai</p> <p>2. Profiling Potensi Calon Pegawai dan Pemutakhiran materi tes</p> <p>3. Penelusuran pelamar potensial bekerjasama dengan perguruan tinggi</p> <p>4. <i>Talent Pool/</i> Manajemen talenta (Pengawas, Administrator, dan JPT Pratama)</p> <p>5. Profiling (Statistik) Kesesuaian (fitting) Potensi dan Kompetensi Pegawai dan jabatan</p> <p>6. Penerapan magang kerja</p> <p>7. Pengembangan Karier Berbasis Merit dengan pemanfaatan E-Manajemen Talenta</p> <p>8. Penerapan Seleksi Terbuka</p> <p>9. Profiling Pegawai</p> <p>10. Penerapan Manajemen Kinerja</p> <p>11. Profiling (Statistik) Kepatuhan Penerapan</p>

		<p>Manajemen Kinerja</p> <p>12. Profiling (Statistik) Kepatuhan Penerapan Peraturan Disiplin dan Kode Etik</p> <p>13. Penerapan Pegawai Teladan</p> <p>14. Pemutakhiran bobot dan kelas Jabatan</p> <p>15. Pemutakhiran SIK</p> <p>16. Pembuatan Statistik Kepegawaian</p>	<p>Peraturan Disiplin dan Kode Etik</p> <p>12. Penerapan Pegawai Teladan</p> <p>13. Pemutakhiran bobot dan kelas Jabatan</p> <p>14. Pemutakhiran SIK</p> <p>15. Pembuatan Statistik Kepegawaian</p>
6.	Penguatan Akuntabilitas	<p>1. Evaluasi dari Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan pada Renstra 2015 – 2019</p> <p>2. Penyempurnaan dan inovasi Evaluasi dan Monitoring dari Renja K/L</p> <p>3. Pemanfaatan Renja K/L dalam perencanaan anggaran Tahun yang akan datang</p> <p>4. Aplikasi RKT secara online di lingkungan BKN</p> <p>5. Penyempurnaan Aplikasi SIAK yang terintegrasi dengan Aplikasi SKP Kinerja Individu</p> <p>6. Sosialisasi Indikator Kinerja Utama</p> <p>7. Sosialisasi Aplikasi SIAK BKN, Workshop Implementasi Reviu SAKIP dilingkungan BKN, Sosialisasi Kinerja Unit terintegrasi dengan Kinerja Individu</p> <p>8. E-LKj</p>	<p>1. Perka BKN tentang Renstra BKN Tahun 2020 – 2025</p> <p>2. Penetapan PK secara konsisten</p> <p>3. Integrasi dari Aplikasi Renja K/L</p> <p>4. Integrasi dari Aplikasi RKT</p> <p>5. Integrasi Aplikasi SIAK BKN dengan aplikasi online yang ada di BKN</p> <p>6. Sosialisasi Indikator Kinerja Utama</p> <p>7. Sosialisasi Aplikasi SIAK BKN, Workshop Implementasi Reviu SAKIP dilingkungan BKN, Sosialisasi Kinerja Unit terintegrasi dengan Kinerja Individu</p> <p>8. E-LKj</p>

		SIAK BKN, Workshop Implementasi Reviu SAKIP di lingkungan BKN 8. <i>Benchmarking</i> dari LKjBKN	
7	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas 2. Penetapan Zona Integritas BKN 3. Pengembangan Aplikasi <i>Whistle Blowing System.</i>	1. Pembangunan Zona Integritas 2. Penetapan Zona Integritas BKN
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Implementasi standard pelayanan berbasis ISO 2. Survei kepuasan masyarakat bernilai baik 3. Percepatan pelayanan (maks : 15 Hari) 4. Pengembangan pelayanan <i>single window</i> 5. Pengembangan pelayanan berbasis IT yang lebih cepat 6. Monitoring kinerja pelayanan 7. Evaluasi kinerja pelayanan 8. Monitoring kinerja pelayanan 9. Evaluasi kinerja pelayanan 10. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai 11. Survei integritas pegawai	1. Implementasi standard pelayanan berbasis ISO 2. Survei kepuasan masyarakat bernilai baik 3. Percepatan pelayanan (maks : 15 Hari) 4. Pengembangan pelayanan <i>single window</i> 5. Pengembangan pelayanan berbasis IT yang lebih cepat 6. Monitoring kinerja pelayanan 7. Evaluasi kinerja pelayanan 8. Monitoring kinerja pelayanan 9. Evaluasi kinerja pelayanan 10. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai 11. Survei integritas pegawai

4.Penetapan Tim RB BKN Tahun 2018 dan 2019

Sebagai upaya untuk merencanakan sekaligus melaksanakan RB BKN, Pimpinan BKN telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara yang tertuang dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16.2/KEP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara. Tim yang dibentuk ini meliputi Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Asesor, Tim Sekretariat serta Tim Reformasi Birokrasi Kantor Regional. Tim Pelaksana merupakan representatif dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Tim ini telah melakukan tugas dan kewajibannya selama tahun 2018 yang kemudian diperbarui untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2019 dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 66/KEP/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara.

5.Tindak Lanjut Rekomendasi Tim RB Nasional

Sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2017 oleh KemenPAN-RB dengan surat nomor B/221/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018, ada 8 (delapan) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan BKN terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, yaitu :

- a. Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan BKN dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra BKN 2020-2024 dan selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB**

Badan Kepegawaian Negara pada bulan Juni 2019 telah melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan BKN. Reviu Road Map RB BKN bertujuan untuk melakukan evaluasi mengenai relevansi Road Map Reformasi Birokrasi BKN dengan perkembangan terkini dan memberikan rekomendasi/masukan perbaikan Road Map RB BKN dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Ruang lingkup dari Reviu Road Map RB BKN ini adalah Reviu terhadap quick wins reformasi birokrasi BKN tahun 2015-2019 dan Reviu terhadap rencana aksi reformasi birokrasi BKN tahun 2015-2019.

- b. Secara berjenjang menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan di BKN kepada seluruh pegawai di seluruh satuan**

kerja agar seluruh pegawai di seluruh satuan kerja memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan.

Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi dan zona integritas pada bulan Mei 2019 agar nilai-nilai dari semangat Reformasi Birokasi dan Zona Integritas dapat pula menjadi nilai-nilai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kepegawaian secara profesional dan bermartabat. Selain itu, dilaksanakannya kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi terkait arah kebijakan dan program Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara kepada seluruh Pejabat/Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Negara Pusat. Peserta kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Badan Kepegawaian Negara Pusat adalah seluruh ASN di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara dan Calon PNS Badan Kepegawaian Negara T.A. 2018.

c. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan “agen perubahan” serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud

Bahwa diperiode semester kedua Tahun 2019, Tim RB BKN akan menyusun Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Pedoman tersebut merupakan acuan bagi Pejabat/Pegawai untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selanjutnya, Tim RB BKN akan memperbaharui Keputusan tentang Penunjukkan agen perubahan di tiap unit kerja di lingkungan Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN/Unit Pelaksana Teknis BKN. Selain itu, Tim Pokja Manajemen Perubahan akan menyusun Buku Saku yang berisi Panduan bagi Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Agar perubahan mindset aparatur dapat terwujud, maka Tim Pokja Manajemen Perubahan juga akan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada agen perubahan di tiap unit kerja di lingkungan Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN/Unit Pelaksana Teknis BKN untuk merefresh kembali pemahaman para agen perubahan terkait peran mereka sesuai ketentuan PermenpanRB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dan Buku Panduan Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Tim Pokja Manajemen Perubahan juga akan memberikan bimbingan kepada para agen perubahan dalam perubahan *mind set* sebagai agen perubahan dari 8 area perubahan yang ditetapkan dan membuat *action plan* yang diberi jangka waktu untuk membuktikan rencana tindak. Rencana Tindak tersebut nantinya akan terus dipantau dan dievaluasi oleh Tim

Pokja Manajemen Perubahan. Tujuan utamanya adalah mempercepat perubahan *mind set* dan *culture set* di unit kerja para agen perubahan.

d. Memperluas penerapan e-government dalam mekanisme kerja untuk memudahkan pemantauan atas setiap pelaksanaan mekanisme kerja tersebut serta untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BKN telah diatur melalui Surat Edaran Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SINKA/V/2019 tentang mekanisme penyajian dan pemanfaatan data serta informasi aparatur sipil negara dan Surat Edaran Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05/SINKA/V/2019 tentang mekanisme pembangunan aplikasi di unit kerja Badan Kepegawaian Negara.

Tahun 2019 kelompok kerja penataan tata laksana dan unit terkait merencanakan program peningkatan SPBE di lingkungan BKN dengan menginventarisir aplikasi yang digunakan oleh kantor pusat BKN dan kantor regional BKN dan menginventarisir aplikasi berbagi pakai baik tingkat nasional maupun internal.

Dalam rangka menunjang peningkatan SPBE BKN, maka BKN telah melakukan penyusunan draft peraturan perundang-undangan terkait sistem dan aplikasi yang terdapat di BKN sejumlah 5 (lima) draft peraturan (terlampir).

Adapun kegiatan E-Government yang dilakukan BKN Tahun 2018-2019, antara lain :

- 1) Pembangunan Aplikasi Internal Pembangunan aplikasi internal di BKN;
- 2) Pembangunan Aplikasi Helpdesk Aplikasi helpdesk dibangun untuk mengatasi permasalahan yang diajukan oleh pelamar maupun PNS;
- 3) Pembangunan Aplikasi SSCN 2018 (Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil) 2018;
- 4) Web service dengan instansi;
- 5) Pembangunan SI ASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara);
- 6) Pembangunan Sistem Rekrutmen Terintegrasi Pembangunan;
- 7) Pencetakan SK Pensiun oleh Instansi.

e. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal

Bahwa diperiode semester kedua Tahun 2019, Tim Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sedang menyusun Draft Pedoman Review Kinerja Individu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Review Kinerja Individu merupakan instrument yang berisi pedoman yang akan

digunakan bagi setiap atasan langsung di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya secara periodik.

f. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai

Upaya penyegaran terhadap Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian untuk memperkuat integritas aparatur dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi dan zona integritas yang dilaksanakan sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2019, setelah dilakukan kegiatan sosialisasi dan internalisasi tersebut juga dilakukan survey integritas bagi yang mengikuti kegiatan tersebut. Pada semester pertama Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara juga wajibkan kepada seluruh Pegawai ASN dilingkungan BKN untuk mengisi dan menyerahkan LHK Pegawai ASN ke Inspektorat BKN. Selain itu, setiap Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat yang mengelola SDM dan anggaran telah mengisi dan menyerahkan LHKPN ke KPK. LHKPN tersebut kemudian dipublikasi melalui *e-announcement* LHKPN BKN.

g. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Kepegawaian Negara di Tahun 2018-2019 terdiri dari 5 kegiatan, yaitu: (1) Implementasi standar pelayanan berbasis ISO, (2) Survei kepuasan masyarakat bernilai baik, (3) Percepatan pelayanan, (4) Pengembangan pelayanan *single window*, dan (5) Pengembangan pelayanan berbasis TI yang lebih cepat. Sementara itu, Program Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan terbagi atas 4 kegiatan antara lain: (1) Monitoring kinerja pelayanan, (2) Evaluasi kinerja pelayanan, (3) Penanganan pengaduan Pelayanan, dan (4) Tindak lanjut Penanganan Pengaduan. Terakhir, program penguatan integritas dalam pelayanan Publik dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Inspektorat BKN yang meliputi 2 kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai, dan (2) Survei integritas pegawai.

Untuk mendorong inovasi pada setiap unit kerja ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara yang meliputi kewajiban membuat inovasi pelayanan publik bagi Calon PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang disinergikan dalam

kegiatan Latihan Dasar CPNS BKN Tahun 2018 dan Tahun 2019, kewajiban membuat inovasi pelayanan publik bagi PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang disinergikan dalam kegiatan Diklat Kepemimpinan di Pusbang ASN BKN Tahun 2018 dan 2019, dan menggelar acara sharing session dengan tema budaya inovasi di Birokrasi yang dihadiri oleh perwakilan setiap unit kerja di BKN Pusat pada Tahun 2019.

h. Meningkatkan kapasitas Tim Assesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 18 Maret 2019 telah mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi pada fungsi Konsultan dan Quality Assurance di Badan Kepegawaian Negara. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Assesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.

6. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Pokja Manajemen Perubahan Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO.	AGENDA KERJA	OUTPUT	MITRA KERJA	TARGET WAKTU
I MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut RB BKN 2018	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) RB BKN 2018	Biro Perencanaan Biro Kepegawaian Tim Pokja RB BKN	Januari 2018
2	Pembentukan peran <i>Agent Of Change</i>	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	Biro Kepegawaian	April 2018
3	Penguatan peran <i>Agent Of Change</i> (Penyusunan rencana aksi dan melaksanakan monev)	- Rencana Aksi <i>Agent Of Change</i> - Laporan monev <i>Agent Of Change</i>	Unit Kerja/Satuan Kerja	- Februari - Juli dan Desember
4	Sosialisasi dan	- Sharing session	- Biro	Februari -

	Internalisasi RB di lingkungan Kantor Regional BKN	di Kantor Regional BKN - Pojok RB di Website BKN - Buku saku RB - <i>White Board Animation</i>	Kepegawaian - Biro Perencanaan - Biro Humas - Tim Pokja RB BKN	November
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BKN secara berkala	Laporan kegiatan monev RB secara berkala (per semester)	- Biro Perencanaan - Biro Kepegawaian - Tim Pokja RB BKN	Juli dan Desember
6	Merevisi Keputusan Kepala BKN tentang Tim Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2019	Keputusan Kepala BKN Nomor 66/KEP/2019 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara	Biro Kepegawaian Direktorat Perundang-Undangan	Januari 2019
7	Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut RB BKN 2019	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 2019	Tim Pokja RB BKN Tim Sekretariat RB BKN	Februari 2019
8	Reviu Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2015-2019	Laporan Reviu Road Map RB BKN 2015-2019	Biro Perencanaan	Oktober 2019
9	Sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI) kepada seluruh pegawai BKN, baik Pusat maupun Kantor Regional	Laporan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI)	Tim Pokja RB BKN Unit Kerja/Satker	Januari-Mei
10	Bimbingan Teknis kepada Tim Assessor tentang pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI)	Laporan Bimbingan Teknis pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI)	Biro Kepegawaian	Maret
11	Optimalisasi peran Agen Perubahan (merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program RB)	Memperbaiki anggota Tim Agen Perubahan Rencana aksi dan laporan monev kegiatan Agen Perubahan di Unit Kerja	Biro Kepegawaian	Julii-Desember
12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi RB secara berkala	Tim Sekretariat RB BKN Unit Kerja/Satker	Desember

7.Perkembangan Nilai RB untuk Pokja Manajemen Perubahan

Program pada area perubahan ini bertujuan sebagai pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Target yang akan dicapai melalui program pada area ini adalah sumber daya manusia di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang pada akhirnya akan mengarah kepada pembelajaran organisasi Badan Kepegawaian Negara (Building Learning Organization).

Pada tahun 2017, nilai sub komponen manajemen perubahan baru mencapai 3,17 % dari bobot nilai sebesar 5,00 %. Nilai tersebut naik pada tahun 2018 menjadi 3,20 %.

Berikut perbandingan Nilai Manajemen Perubahan BKN tahun 2018 atas penilaian tahun 2017 sesuai dengan dengan hasil evaluasi KemenPAN dan RB.

Nilai RB BKN TAHUN 2017 - 2018

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2017	2018
I.	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,17	3,20
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,83	4,17
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,47	2,73
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,24	12,79
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,15	3,75
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,35	6,58
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,46	4,21
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	40,38	40,14
II	Komponen Hasil			

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,41	8,40
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,92	4,97
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,13	6,02
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,12	8,55
Total Komponen Hasil (B)		40,00	30,58	30,94
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	70,96	71,08

8. Penanggung Jawab

Penanggung jawab Program Manajemen Perubahan adalah Andi Anto selaku Ketua Pokja Manajemen Perubahan yang sekaligus menjabat sebagai Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB III

PEMANTAUAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BKN

TAHUN 2018-2019

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang pada Road Map BKN 2015-2019, Pokja Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi BKN melaksanakan pemantauan secara berkala dengan mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018 (LKE RB Tahun 2018), dengan gambaran pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

NO.	AGENDA KERJA	OUTPUT	MITRA KERJA	TARGET WAKTU	KETERANGAN
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut RB BKN 2018	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) RB BKN 2018	Biro Perencanaan Biro Kepegawaian Tim Pokja RB BKN	Januari 2018	Selesai
2	Pembentukan peran <i>Agent Of Change</i>	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	Biro Kepegawaian	April 2018	Keputusan Kepala BKN ini tertuang Keputusan Kepala BKN Nomor 80.2/KEP/2018 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Peraturan diterbitkan pada bulan Mei seiring berakhirnya Kepka BKN Nomor 41.6/KEP/2018 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang berlaku pada

					tahun 2017 hingga 20 April 2018.
3	Penguatan peran <i>Agent Of Change</i> (Penyusunan rencana aksi dan melaksanakan monev)	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Aksi <i>Agent Of Change</i> - Laporan monev <i>Agent Of Change</i> 	Unit Kerja/Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Februari - Juli dan Desember 	<ul style="list-style-type: none"> -Selesai -Laporan Monev Juli Selesai
4	Sosialisasi dan Internalisasi RB di lingkungan Kantor Regional BKN	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sharing session</i> di Kantor Regional BKN - Pojok RB di Website BKN - Buku saku RB - <i>White Board Animation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Kepegawaian - Biro Perencanaan - Biro Humas - Tim Pokja RB BKN 	Februari – November	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing session sudah dilakukan di Kantor Regional BKN Yogyakarta, Surabaya, Bandung, DKI Jakarta, Medan dan Makassar - Pojok RB sudah diisi dokumen laporan Pokja namun belum lengkap - Sharing session sudah dilakukan di Kantor Regional BKN Yogyakarta, Surabaya, Bandung, DKI Jakarta, Medan dan Makassar - Pojok RB sudah diisi dokumen laporan Pokja namun belum lengkap
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BKN secara berkala	Laporan kegiatan monev RB secara berkala (per semester)	<ul style="list-style-type: none"> -Biro Perencanaan -Biro Kepegawaian -Tim Pokja RB BKN 	Juli dan Desember	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monev Juli selesai
6	Merevisi	Keputusan	Biro	Januari	Keputusan

	Keputusan Kepala BKN tentang Tim Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2019	Kepala BKN Nomor 66/KEP/2019 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara	Kepegawaian Direktorat Perundang-Undangan	2019	Kepala BKN Nomor 66/KEP/2019 telah disahkan dan disosialisakan ke seluruh TIM RB BKN
7	Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut RB BKN 2019	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 2019	Tim Pokja RB BKN Tim Sekretariat RB BKN	Februari 2019	Dok. RATL Rapat dengan Tim Sekretariat tanggal 29 April 2019
8	Reviu Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2015-2019	Laporan Reviu Road Map RB BKN 2015-2019	Biro Perencanaan	Oktober 2019	Terlaksana pada Bulan Desember Rapat dengan Biro Perencanaan pada Bulan Mei 2019
9	Sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI) kepada seluruh pegawai BKN, baik Pusat maupun Kantor Regional	Laporan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI)	Tim Pokja RB BKN Unit Kerja/Satker	Januari-Mei	Laporan Sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI) Rapat dengan Tim Sekretariat tanggal 29 April 2019
10	Bimbingan Teknis kepada Tim Assessor tentang pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI)	Laporan Bimbingan Teknis pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI)	Biro Kepegawaian	Maret	Laporan Bimbingan Teknis pelaksanaan RB dan Zona Integritas (ZI). Rapat dengan Tim Sekretariat dan Tim Assessor tanggal 29 April 2019
11	Optimalisasi peran Agen Perubahan (merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program RB)	Memperbaiki anggota Tim Agen Perubahan Rencana aksi dan laporan	Biro Kepegawaian	Juli-Desember	Contoh laporan implementasi 1 dan 2 dan rencana aksi agen perubahan di

		monev kegiatan Agen Perubahan di Unit Kerja			Unit Kerja
12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi RB secara berkala	Tim Sekretariat RB BKN Unit Kerja/Satker	Desember	Laporan Monev
II PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian	Tertatanya peraturan perundangan di bidang kepegawaian (<i>sehingga tidak tumpang tindih, pertentangan, konflik norma</i>)	-Dit. PPU -Kementerian Hukum & HAM -Kementerian PANRB -Kemendagri -Pejabat JPT Madya di Lingkungan BKN, Kantor Regional BKN dan Unit Kerja di BKN	Januari - December 2018	
2	Sistem Pengendalian Penyusunan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian	Terciptanya sistem penyusunan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang efektif dan efisien	Dit. PSIK Unit Kerja dan Sekretariat Pimpinan di lingkungan BKN Beberapa intansi terkait (random)	Maret - November 2018	
3	Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu di Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi baik dengan Pusat maupun Anggota JDIH	-Dit. PPU -Dit. PSIK	Januari-Desember 2018	
III PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI					
1	Menyusun rencana aksi tindak lanjut	RATL Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi		Januari-Desember 2018	
2	Pemantauan evaluasi kinerja UPT	Laporan pemantauan evaluasi kinerja UPT	UPT BKN, Kantor Regional BKN, Instansi	Juni 2018- Desember 2019	

			Pemerintah yang menggunakan jasa UPT BKN		
3	Penyelesaian Pembahasan SOTK	Draft SOTK	Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB, seluruh unit kerja Eselon II di BKN, Kantor Regional BKN	Januari-Desember 2019	
4.	Melakukan evaluasi kelembagaan di lingkungan BKN menggunakan instrument di PermenpanRB Nomor 20 Tahun 018	Nilai Evaluasi Kelembagaan di BKN	Seluruh unit kerja Eselon II di BKN dan Kantor Regional BKN	Juni-Desember 2018	Nilai Evaluasi 58,188 (termasuk dalam peringkat komposit 3 (P-3))
IV	PENATAAN TATALAKSANA				
1	Program Proses Bisnis dan Prosedur Tetap (SOP) Kegiatan Utama	- Laporan Monitoring - Laporan Tindak Lanjut		Januari s.d. Desember 2018	
2	Keterbukaan Informasi Publik	- Berita Kegiatan BKN yang diupload pada Web official BKN - Peraturan/ Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BKN - Pengembangan Pelayanan Single Window berbentuk Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT)		Januari s.d. Desember 2018	
3	Program e-Government	- Pembangunan Aplikasi Internal Helpdesk, Pembangunan SSCN (https://tin		Januari s.d. Desember 2018	

		<p><u>y.cc/SSCN2_018), Webservice dengan instansi, Pengembangan SI ASN dan Sistem Rekrutmen Terintegrasi Integrasi hasil pengolahan nilai SSCN, Pencetakan SK Pensium oleh instansi (https://tiny.cc/MYSA_PK2018), Pengembangan aplikasi MYSAPK Mobile</u></p>			
4	Penyusunan Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen proses bisnis level 0 - Dokumen proses bisnis level 1 - Dokumen proses bisnis level 2 		Januari s.d. Desember 2019	
5	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SOP	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan monitoring dan evaluasi - Dokumen SOP PTSP 		Januari s.d. Desember 2019	
6	Melakukan Pengembangan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan aplikasi yang dipakai - Laporan SPBE tahun 2019 dan integrasi sistem kepegawaian 		Januari s.d. Desember 2019	
7	Menerapkan	- Laporan		Januari s.d.	

	kebijakan informasi publik	- konten informasi Laporan sosial media		Desember 2019	
8	Monitoring dan evaluasi kebijakan informasi publik	- Draft peraturan Laporan monitoring dan evaluasi		Januari s.d. Desember 2019	
9	Pengelolaan Kearsipan	- SOP penyelenggaraan karsipan - Draft peraturan BKN tentang penyelenggaraan karsipan		Januari s.d. Desember 2019	
V	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Kebutuhan pegawai berbasis kualifikasi dan kompetensi, serta dengan renstra BKN dengan menggunakan e-perencanaan pegawai	Laporan penetapan perencanaan kebutuhan pegawai	Pusrenpegfor BKN, Kementerian PANRB	Januari 2018- Desember 2019	
2	Profiling potensi calon pegawai dan pemutakhiran materi tes				
3	Penelusuran pelamar potensial bekerja sama dengan perguruan tinggi				
4	Talent pool bagi pengawas, administrator, dan JPT; profiling fitting potensi dan kompetensi pegawai dengan jabatan jabatan	Laporan Talent Pool dan Profiling fitting potensi dan kompetensi Pegawai			
5	Pengembangan karir berbasis merit dengan memanfaatkan e-manajemen				

	talenta; penerapan seleksi terbuka				
6	Profiling kinerja pegawai; penerapan manajemen kinerja				
7	Profiling (statistic) kepatuhan penerapan peraturan disiplin dan kode etik				
8	Penerapan pegawai teladan				
9	Pemutakhiran bobot dan kelas jabatan				
10	Pemutakhiran SIK;pembuatan statistic kepegawaian				
VI	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Penyempurnaan definisi kinerja pada Rencana Strategis 2020 - 2024	Tersusunnya dokumen cascading indikator kinerja dan definisi kinerja di lingkungan BKN	Biro Perencanaan dan unit kerja terkait	Januari 2019 sd Mei 2019	
2	Penyusunan pedoman kinerja organisasi hingga kinerja masing-masing individu dengan memperhatikan proses bisnis, tugas fungsi serta peran setiap individu terhadap organisasi	Tersusunnya pedoman penyusunan kinerja organisasi	Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Direktorat Kinerja ASN	Januari 2019 sd Desember 2019	
3	Pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pengelolaan kinerja mulai dari penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja penyusunan laporan kinerja	Jumlah satuan kerja yang melakukan penyusunan laporan kinerja dengan benar	Direktorat Kinerja ASN		
4	Meningkatkan	Tersusun peringkat	Biro Perencanaan,	Januari 2019 sd	On Progress

	kualitas evaluasi dan pemeringkatan SAKIP di lingkungan BKN	capaian kinerja unit dan kanreg BKN	Bappenas, Kemenkeu	Januari 2020	
VII	PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengelolaan Gratifikasi -Melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi dan menindaklanjuti evaluasi	Laporan hasil evaluasi dan tindaklanjut	Inspektorat Kedeputian Wasdal	Januari-Juni Oktober-Desember	Tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian: <u>Gratifikasi</u>
2	Penerapan SPIP- Melakukan pemantauan atas lingkungan pengendalian dan evaluasi penilaian resiko organisasi	Draft Manajemen Resiko	Inspektorat Kedeputian Wasdal	Januari - Juni	-Workshop -Draft Manajemen - Resiko Peta Resiko
3	Melakukan evaluasi atas kebijakan pengaduan masyarakat	laporan evaluasi kebijakan pengaduan masyarakat	Kedeputian Wasdal	April-Juni Oktober-Desember	Laporan tindak lanjut monev pengaduan masyarakat
4	Whistle Blowing System - Membangun aplikasi Whistle Blowing System yang terintegrasi - Implementasi	Laporan tindak lanjut WBS	Inspektorat Kedeputian Wasdal	Juli-Desember	-Manual Book WBS -Sosialisasi WBS melalui video dan rakornas -Laporan WBS 2018 -Laporan tindaklanjut WBS 2018
5	Penerapan Benturan Kepentingan -Membuat SOP penanganan benturan kepentingan	Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Inspektorat	April-September	Laporan Pelaksanaan penanganan benturan 2017 dari Kantor Regional X BKN Denpasar
6	Pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan unit yang	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat		KEPKA BKN Nomor 133/KEP/2018 tanggal 26 Agustus

	dikembangkan dan evaluasi zona integritas yang telah ditentukan, serta penetapan unit kerja menuju WBK/WBBM				Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas
7	Rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan dukungan SDM dan anggaran yang memadai serta berfokus pada client yang berbasis resiko	Laporan Hasil Audit Berbasis resiko PKPT 2018	Inspektorat	2018	-Surat Tugas Tim IACM Inspektorat -Analisa Kekuatan SPM Auditor 2017,2018,2019 -POK 2018, Pagu Rp. 1.809.283.000 -Peta risiko audit
VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Implementasi standard pelayanan berbasis ISO 9001:2008	Laporan penerapan ISO 27001 Proses Akreditasi Lembaga Assessment Pemerintah	Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian		Sertifikasi ISO 27001:2005 untuk Ruang Data Center Lantai 12 Gedung 2 BKN pada 17 Desember 2018
2	Survei kepuasan masyarakat	Hasil survei kepuasan masyarakat bernilai baik dengan total IKP 80,61	Biro Humas		- <u>Laporan hasil Survei</u> - IKP 80,61 - ePolling: 73,45% sangat puas - Survey kepuasan program P2K di Papua dan Papua Barat
3	Percepatan Pelayanan (maksimal 15 hari): - Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat	Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	Biro Humas		-Laporan pengembangan pelayanan <i>single window</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pelayanan <i>single window</i> 				
4	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pelayanan berbasis TI: <ul style="list-style-type: none"> - E-government dalam layanan kepegawaian (optimalisasi pemanfaatan SAPK yang merupakan aplikasi NCSIS) - Pemanfaatan media monitoring - 	Laporan kegiatan pengembangan pelayanan berbasis TI	Biro Humas Kedeputian SINKA Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan		<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sistem Informasi ASN berbasis elektronik (aplikasi NCSIS)</u>
5	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan - Penanganan pengaduan pelayanan: penyiapan Helpdesk SSCN - Tindak lanjut penanganan pengaduan: Evaluasi sistem LAPORBKN! 	Laporan monitoring dan evaluasi	Biro Humas Biro Kepegawaian Kedeputian SINKA	Januari - Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kerja PKT - Media Helpdesk SCCN telah tersedia - Hasil evaluasi sistem LAPOR BKN menunjukkan bahwa terdapat percepatan penyelesaian laporan (lebih cepat 7 hari dari rata-rata respons tahun 2017)
6	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam rangka penguatan integritas dalam pelayanan publik: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi perubahan mindset menuju pelayanan prima - Workshop Budaya Pelayanan Prima - Studi banding pelayanan publik - Survei integritas pegawai 	Laporan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai	Biro Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> - Survei integritas pegawai telah dilaksanakan dengan hasil indeks 90,49.

BAB IV **PENUTUP**

Inti dari Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan Birokrasi yang lebih efektif dan efisien dengan mengedepankan kemudahan pelayanan yang bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagai upaya menuju terwujudnya hal itu, perubahan menjadi hal yang mutlak dilakukan di semua lini sektor di BKN. Keterlibatan semua unsur dan yang paling utama adalah komitmen Pimpinan beserta jajaran menjadi kunci utama kesuksesan RB di BKN.

Laporan pelaksanaan RB untuk Pokja Manajemen Perubahan merupakan sarana untuk melaporkan perkembangan RB di BKN telah diupayakan untuk disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Pokja sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16.2/KEP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 66/KEP/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019. Tentunya masih banyak kekurangan dan potensi perbaikan dari Laporan ini. Oleh karena itu, Pokja Manajemen Perubahan membuka diri untuk kritik, saran ataupun masukan dari semua pihak guna suksesnya pelaksanaan program kerja khususnya Pokja Manajemen Perubahan dan BKN pada umumnya.

Demikian laporan Pokja Manajemen Perubahan untuk pelaksanaan RB BKN Tahun 2018 dan semester pertama 2019. Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan, partisipasi, dorongan, saran dan berbagai hal sehingga penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN